

## PENGARUH EFEKTIVITAS SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA WILAYAH KECAMATAN BRUNO

Wijayanti<sup>1)</sup>

Agus Dwi Atmoko<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji

Jl. Wismoaji no. 08 Kutoarjo, Purworejo

Email : [wijyantibruno12@gmail.com](mailto:wijyantibruno12@gmail.com)<sup>1)</sup>

Email : [agus.ak@polsa.ac.id](mailto:agus.ak@polsa.ac.id)<sup>2)</sup>

### *Abstract*

*This study discusses to study and analyze the Effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Budget Realization Reports in the Bruno District Area.*

*The population in this study were all sub-districts in bruno village and all villages in 18 villages in bruno sub-district. By using saturated samples obtained 27 people as respondents. The type of data used is primary data. The research methods in this thesis are quantitative analysis, data quality test, classic assumption test, and multiple regression analysis test. The independent variables in this study are the control environment, discussion, control activities, information and communication, and monitoring while the dependent variable is the quality of the budget improvement report in the Bruno sub-district area.*

*The results of this study prove the facts related to environmental monitoring, risk evaluation, control activities, information and communication, and significant monitoring of the quality of the budget realization report in the Bruno sub-district area. Formally, the environment controls, on quality, reports, budgets, sub-districts, Brunei, while, assessments, activities, communications, and monitoring, do not match the quality of the budget reports in the Brunei Districts.*

*Keywords : SPIP, Effectiveness Effectiveness, Quality of Budget Realization Reports in the Bruno District Area.*

## 1. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung cara mengelola keuangannya.

Pengelola keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan akuntabilitas

publik. Menurut (Mardiasmo,2002:20) “Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Menurut (Darise,2008:19) “Pelaksana otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab”. Sehingga diperlukan rencana kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan berapa dana yang harus dianggarkan agar dana yang dipersiapkan oleh pemerintah dapat digunakan dengan baik dan bisa tepat sasaran dan tentu perlu adanya pengendalian dari pemerintah untuk mengawasi rencana tersebut apabila telah berjalan.

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut sesuatu

perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Sebelum lahirnya tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam sistem penganggaran di Indonesia. Menurut (Dedi Nordiawan: 2011:13). “Beberapa permasalahan yang sangat mendasar dalam sistem penganggaran di Indonesia, yang seringkali dikemukakan oleh berbagai pihak termasuk lembaga internasional” yaitu:

1. Tidak jelasnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, karena seringkali kebijakan disusun tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan pengalokasian anggaran tidak mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan masyarakat karena penekanan diberikan pada kontrol terhadap *input* bukan pada pencapaian *output* dan *outcomes*, serta kurang memperhatikan prediktabilitas dan kesinambungan daripada pendanaannya.
3. Kurangnya disiplin fiskal, karena total belanja negara tidak disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya, dan perumusan kebijakan fiskal hanya terfokus pada stabilitas ekonomi makro jangka pendek.

Selain itu fenomena pembangunan yang berkembang saat ini telah terjadi di segala bidang dan adanya tuntutan ekonomi daerah serta korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan *good govermance* yang ditandai adanya tiga pilar

utama yaitu : transparan, partisipasi, dan akuntabilitas, untuk itu perlu adanya penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil dan berdaya guna.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu upaya perbaikan secara terus menerus atas manajemen keuangan public karena hal ini selaras dengan tuntutan dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilakukan *good governance* sebenarnya bukan hal yang baru, karena masyarakat di negara manapun menghendaki pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya dan memastikan program yang telah direncanakan dan di anggarkan dapat berjalan dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang baru, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi perlu dilakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *value of monry* sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja yang memperhatikan konsep *value for money* dan tidak menggunakan anggaran tradisional.

*Building Institutions For Good Governance* – BIGG (2001) (Dalam Rahardjo Adisasmita,

2011: 52) “anggaran kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan”. Melalui proses anggaran kinerja, pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluran dan hasil dari masing-masing program dan pelayanan, kemudian pemerintah daerah dapat membuat target untuk pencapaiannya. Dengan demikian, pengeluaran dilakukan berdasarkan prioritas dan unit kerja harus bertanggung jawab terhadap hasil (*Output* dan *Outcome*).

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. LKPD harus mengikuti standar akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat

dibandingkan serta dapat dipahami dengan demikian pengguna laporan keuangan tersebut dapat memperoleh informasi yang berkualitas serta bermanfaat.

Penjelasan UU Nomor 1 tahun 2004 menyebutkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintah berisikan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Berkaitan dengan sistem pengendalian intern, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPIP adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat

(1) UU Nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Badan pemeriksa keuangan dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan, dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau jasa kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang intergal pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mahmudi (2007:24) menyatakan bahwa “untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Mahmudi (2007:27) “Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP), kualitas laporan realisasi anggaran sangat dipengaruhi atas bagus atau tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Hal ini didukung dari penelitian Herawati (2014:74) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara unsur-unsur SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Namun pengaruh SPIP terhadap laporan keuangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dimana menurut Laila (2009:83) SPIP tidak langsung mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten di muka dan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD mendorong penulis untuk meneliti kembali pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) terhadap kualitas laporan realisasi anggaran dengan judul : **“Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Wilayah Kecamatan Bruno”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
2. Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
3. Apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan Bruno.
4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
5. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
6. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

### **Batasan Masalah**

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir (TA) ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran Kantor Kecamatan Bruno.

## Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah lingkungan berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
2. Untuk mengetahui apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan Bruno.
4. Untuk mengetahui apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan Bruno.
5. Untuk mengetahui apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada Kecamatan Bruno.
6. Untuk mengetahui apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

## Metode Penelitian

### Jenis Data

Jenis penelitian adalah data kuantitatif, jenis eksplanasi dalam penelitian ini adalah hubungan asosiatif kausal (hubungan sebab akibat) dimana “jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y” (Erlina, 2011:66) Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Kecamatan Bruno.

## Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. (Sugiyono, 2017:137) “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian (Sugiyono, 2017:6) “metode survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.”

## Pengumpulan Data

### 1) Kuesioner

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan *random sampling* dan mendapat jumlah sampel 27 orang. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kuesioner diberikan kepada Camat Bruno, Sekertaris Camat Bruno, Kasubag Perencanaan & keuangan, Kasubag umum & kepegawaian, bendahara pengeluaran, pelaksana pelayanan umum, Kasi Ekobang, pelaksana kasi ekobang, Kasi PMD, pelaksana kasi PMD, Kasi Tata Pemerintahan, pelaksana kasi tata pemerintahan, Kasi Kemasyarakatan, pelaksana kasi kemasyarakatan, Kasi Tramtibum, pelaksana kasi tramtibum, dan 11 Desa di Kecamatan Bruno. Setelah 1 (satu) minggu kuesioner tersebut diambil kembali oleh peneliti dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kuesioner tersebut belum diserahkan, maka dinyatakan kuesioner tersebut tidak kembali. Pilihan jawaban kuesioner menggunakan skala sikap likert dengan skala ukur interval dengan lima jawaban yaitu: sangat Setuju (SS), Setuju (S),

Netral (N), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS).

## 2). Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini. seperti internet serta buku-buku referensi yang berkaitan dengan penulisan laporan ini.

## Kajian Penelitian

### Pengertian Efektivitas

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:4) efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output”.

### Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern sendiri menurut IAI dalam standar profesi akuntansi publik (SPAP) (2001:319) yaitu:

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut, yaitu:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

### Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang intergal pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

### Pengertian Anggaran Secara Umum

Menurut Government Accounting Standard Board (GASB) anggaran (*budget*) dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Anggaran adalah rencana operasi keuangan daerah, yang mencakup estimasi yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode tertentu”.

### Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut.

### Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Munandar (2011:329) laporan realisasi anggaran dapat didefinisikan sebagai berikut:

“laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran, beserta analisa dan evaluasinya, dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang.”

## 1. Pembahasan

Nilai koefisien determinasi  $R^2$  terletak pada kolom *R-Square*. diketahui nilai koefisien determinasi sebesar  $R^2 = 0.742$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel independen kurang mampu menjelaskan variabel kualitas laporan realisasi anggaran sebesar 74.2%, sisanya sebesar 25.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yaitu:

1. Kualitas dalam pelaksanaan (penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penerapan kegiatan pengendalian, penerapan informasi & komunikasi, dan penerapan pemantauan) yang kurang optimal.
2. Responden yang kurang memahami tentang sistem pengendalian intern pemerintah dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

### **Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno**

Hasil uji persial variabel lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, hal ini dilihat dari nilai signifikan variabel lingkungan pengendalian diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0.029 < 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan diterima. Secara umum pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai interval konversi pengaruh efektivitas lingkungan pengendalian terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran adalah 3,83, dengan kategori Baik.

### **Penilaian Risiko Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno**

Hasil uji persial variabel penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

realisasi anggaran, hal ini dilihat dari nilai signifikan variabel penilaian risiko diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0.772 > 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan ditolak. Namun secara umum pengaruh penilaian risiko terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai interval konversi Pengaruh Efektivitas lingkungan risiko terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran adalah 3,86, dengan kategori Baik.

### **Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno**

Hasil uji persial variabel kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, hal ini dilihat dari nilai signifikan variabel kegiatan pengendalian diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0.468 > 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan ditolak. Namun secara umum pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai interval konversi Pengaruh Efektivitas lingkungan pengendalian terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran adalah 3,84, dengan kategori Baik.

### **Informasi Dan Komunikasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno**

Hasil uji persial variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, hal ini dilihat dari nilai signifikan variabel informasi dan komunikasi diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0.241 > 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan ditolak. Namun secara umum pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan

realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai interval konversi Pengaruh Efektivitas lingkungan pengendalian terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran adalah 4,13, dengan kategori Baik.

#### 4.5. Pemantauan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno

Hasil uji persial variabel pemantauan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, hal ini dilihat dari nilai signifikan variabel pemantauan diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0.078 > 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan ditolak. Namun secara umum pengaruh pemantauan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai interval konversi Pengaruh Efektivitas pemantauan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran adalah 3,72, dengan kategori Baik.

#### 4.5. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno

Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini terlihat dari nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Sehingga hipotesis diterima. Secara umum pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran pada kecamatan bruno “Baik“ dengan nilai

interval konversi pengaruh efektivitas lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan realisasi anggaran adalah 3,88, dengan kategori Baik.

#### Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini terlihat dari nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Sehingga hipotesis diterima. Secara umum kualitas laporan realisasi anggaran “Baik” dengan nilai interval konversi kualitas laporan realisasi anggaran adalah 3,75, dengan kategori Baik.

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.
2. Pemanfaatan Penilaian Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.
3. Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.
4. Informasi dan Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.
5. Pemantauan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.
6. Penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian,

Informasi dan Komunikasi, Pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bruno.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini dan Puranto. (2011). *Anggaran Berbasis Kinerja*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Arif, Bahtiar dkk, (2012). *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Baswir, Revrison, (2000), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Bodnar, G.H dan Hopwood, W.S (2001). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ke-6*. Salemba Empat, Jakarta
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta
- Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. Ghozali, Imam, dkk (2001), *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Empat. BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia IAI. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat Jakarta
- Indriya Kartika (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan*, Skripsi SI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik, Andi*, Yogyakarta.
- Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*, Cetakan ketiga, Salemba Jakarta
- Moh. Nazir, (2011). *Metode Penelitian*. Cetakan Ke enam. Bogor. Penerbit Ghalia: Indonesia
- Nafarin M, (2004), *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba empat
- Sumber Lain
- Buku Purworejokab,(2017) *Kecamatan Bruno Dalam Angka 2017*